Tindakan Warga Merapi Pascaerupsi Menjaga Daerah Tangkapan Air

Post-disaster Act of Merapi Community to Keep Water Catchment Area

Napsiah

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Sosiologi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. HP. 081369632144. Email: napsiah@uin-suka.ac.id. Diterima 30 Agustus 2016, diperbaiki 16 September 2016, disetujui 7 Oktober 2016.

Abstract

The spring coming from Mount Merapi is the main source of life for local residents, protecting the environment of Merapi is the main actions performed by the residents who live in the area. This study aims to know what Merapi community action to protect the environment. Data were collected by interviewing selected informants using the purposed sampling method who involved and knew the research topic and issues. There were three groups of informants who have subsequently interviewed by snowball sampling method. Non-participant observation was also conducted to triangulate data obtained from interview. The secondary data (through docementary analysis) was used to strengthen the primary data (intervew and observation). The results showed that the action based on local value dialoque and mutual agreement in fact couldn't stop exessive sand mining and exploitation on the slope of Merapi Mountain, it damaged water catchment area. The colective social action called "Bela Lereng Merapi" then done to stop the exessive mining, they overcamesucessfully.

Keywords: action; colective, citizen, environment.

Abstrak

Air yang berasal dari Gunung Merapi merupakan sumber penghidupan bagi warga yang bermukim di sekitarnya, menjaga lingkungan tangkapan air Gunung Merapi merupakan tindakan utama. Penelitian ini bertujuan mengetahui tindakan apa yang dilakukan oleh warga Merapi untuk menjaga lingkungan tangkapan air. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, informan dipilih secara *purposed sampling method* yang dianggap mengetahui, terlibat, dan menguasai informasi yang berkaitan dengan topik dan masalah penelitian. Dari tiga kelompok informan yang dipilih, selanjutnya diwawancarai secara *snowball*. Teknik observasi non partisipan juga dilakukan untuk melakukan triangulasi data dari wawancara. Data sekunder (dari telaah dokumen) digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan nilai (musyawarah) yang dilakukan warga Merapi tidak dapat menghentikan aktivitas penambangan pasir secara berlebihan, sehingga merusak lingkungan tangkapan air. Namun tindakan kolektif yang "Bela Lereng Merapi" menjadi aksi sosial warga Merapi yang mampu menghentikan kerusakan lingkungan.

Kata kunci: tindakan; kolektif; warga; lingkungan.

A. Pendahuluan

Kebergantungan warga pada sumber alam pegunungan sangat tinggi, karena pegunungan menyediakan beragam potensi, salah satunya adalah debit air yang tinggi (Carey, 2005) yang dapat dimanfaatkan untuk sumber penghidupan, baik bagi warga yang bermukim di lerengnya gunung maupun yang bermukim jauh dari lereng gunung (Indrayana, 2010), beragam cara dilakukan pemerintah, salah satunya membuat regulasi

tentang pengelolaan alam dan lingkungan, diimplementasikan dalam Undang-undang RI No 23 tahun 1979, pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Warga juga memiliki cara atau kearifan lokal untuk menjaga lingkungan. Keraf (2006) mengemukakan, kearifan lokal memuat tentang pengetahuan, keyakinan, pemahaman, wawasan, adat kebiasaan, atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan komunitas ekologis. Semua bentuk kearifan lokal dihayati, dipraktikkan, diajarkan, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal menjadi hal penting untuk menjaga lingkungan sekali pun bersifat tradisional, tetapi berguna untuk konservasi lingkungan (Hamid dan Jahja, 2016; Fischer, 2006). Beberapa studi yang mengupayakan konservasi lingkungan dengan menggunakan kearifan lokal terdapat dalam studi Suhartini (2009) yang mengkaji tentang kearifan lokal untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Triyoga (2010) yang mengkaji kearifan lokal masyarakat Merapi. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Qodir (2012) mengkaji tentang kearifan lokal masyarakat Merapi.

Berbeda dengan studi-studi di atas, Malik (2012) mengkaji tentang perayaan "maulid hijau" di lereng Gunung Lamongan. Aksi yang dilakukan warga adalah menanam pohon di lingkungan Gunung Lamongan setiap perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Harapan dari tindakan itu agar hutan di sekitar Gunung Lamongan terjaga, karena warga yang bermukim di sekitarnya sangat bergantung dengan sumber daya alam pengunungan. Khasanah dan Marfai (2012) mengkaji tentang kemampuan adaptasi masyarakat pesisir dari banjir dan tsunami.

Sintesis dari penelitian tersebut adalah kearifan lokal yang berisi larangan dan anjuran telah terbukti secara turun menurun menjadi salah satu strategi masyarakat mengadaptasi diri mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, sehingga lingkungan tidak rusak. Apabila terdapat warga yang melanggar, mereka memperoleh sanksi berupa ketidaknyamanan hidup karena dikucilkan oleh masyarakat.

Upaya warga untuk menjaga lingkungan tidak terbatas pada melakukan praktik-praktik yang tertuang di dalam kearifan lokal saja, tetapi ada cara yang lebih bersifat tegas dengan menggunakan aksi perlawanan pada pihak-pihak yang memanfaatkan sumber daya alam. Hal ini terungkap dalam Gerakan Cipko atau gerakan memeluk pohon. Menurut Tain (1984), gerakan ini dilakukan agar hutan tidak ditebangi karena merupakan sumber air dan penghidupanwarga. Aksi lainnya juga dilakukan di Afrika Utara dan Zimbabwe untuk mengakses sumber air keperluan rumah tangga, yang terungkap dalam penelitian Manzungu (2013). Sintesis dari penelitian tersebut, aksi sosial warga dilakukan sebagai bentuk protes warga terhadap pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam yang berlebihan, sehingga dampak dari aktivitas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan tempat tinggal mereka.

Penelitian tentang aksi sosial warga yang dirujuk di atas berasal dari penelitian asing yang terjadi di luar negeri, sementara penelitian aksi-aksi warga yang bersifat protes dilakukan di dalam negeri masih terbatas, khususnya di lingkungan masyarakat Merapi, suku Jawa yang lebih mengedepankan kearifan lokal untuk menjaga lingkungannya. Kajian ini penting dilakukan agar tindakan warga yang menggunakan aksi sosial dapat dipahami secara komprehensif, tidak dimaknai konflik semata. Menurut Mcdonald (2010), aksi lokal bukan semata-mata konflik, melainkan upaya warga untuk mempertahankan lingkungannya saat pihak lain memanfaatkan potensi alam yang berlebihan, sehingga dapat merusak sumber daya alam lainnya. Menurut Mcdonald, tindakan aksi tersebut dilakukan bukan tanpa proses menuju jalan damai, seperti ada perundingan sebelum dilakukan aksi, melainkan respons dari pemerintah sering tidak berpihak kepada warga, sehingga tindakan aksi menjadi pilihan warga.

Sebelumnya, Weber (1978) menyatakan, tindakan lokal seperti yang diungkap Mcdonal (2010) adalah tindakan rasionalitas karena ada makna di balik tindakan tersebut. Rasional atau irasional sangat bergantung pada yang melakukan tindakan. Weber mengklasifikasikan tindakan rasional ke dalam tindakan instrumen dan

tindakan rasional nilai. Tindakan nilai bersifat abstrak karena berdasarkan nilai yang diyakini, sehingga tindakan dijadikan sarana untuk mencapai tindakan instrumen yang merupakan tindakan konkrit. Weber memandang, nilai agama menjadi spirit pijakan untuk mencapai dasar etos kerja yang tinggi. Menurut Weber, bahwa tindakan rasionalitas nilai dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuannya yakni menjaga lingkungannya, sekalipun tindakan-tindakan tersebut dilakukan dengan menggunakan aksi kolektif.

Aksi kolektif yang dilakukan oleh warga Merapi pascaerupsi adalah upaya untuk membatasi pemanfaatan sumber daya alam berupa pasir, pascaerupsi 2010. Pemanfaatan sumber daya penting dilakukan oleh warga Merapi karena erupsi terakhir mengeluarkan pasir 140.000.000 m³ yang tersebar ke Sungai Gendol, Opak, Kuning, dan di lahan-lahan warga (BPBD Sleman, 2011). Apabila sebaran pasir di lahan-lahan warga yang merupakan tempat tangkapan air dilakukan penggalian pasir dengan menggunakan alat-alat berat, bahkan mencapai kedalaman 25 m, sumber tangkapan air menjadi rusak dan kering, padahal air tersebut adalah sumber penghidupan warga Merapi. Tulisan ini bertujuan mengetahui tindakan-tindakan warga untuk menyelamatkan lingkungan tangkapan air pascaerupsi dari kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan pasir.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, untuk mengungkap tindakan warga menyelamatkan lingkungan tangkapan air. Pengumpulan data dilakukan dengan: Pertama, wawancara, dengan menggunakan purposeful sampling method (metode sampling bertujuan) dengan memilih orang yang dinilai mengetahui, terlibat, dan menguasai informasi yang berkaitan dengan topik dan masalah penelitian (Patton, 1990). Informan dalam penelitian ini adalah mereka yang mengetahui informasi yang dibutuhkan terkait dengan penelitian ini, yang dibedakan dalam tiga kate-

gori: pihak yang memiliki hubungan kedekatan dengan masyarakat, sehingga memiliki informasi mengenai tindakan kolektif lokal yang terjadi. Informan yang termasuk ke dalam kelompok ini meliputi Camat dan sekretaris Kecamatan Pakem dan Turi, Kabupaten Sleman; Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun. Tokohtokoh informal, seperti tokoh agama, pemuda, masyarakat. Pihak yang terlibat dalam proses aktivitas penambangan pasir.

Berdasarkan tiga kelompok informan di atas, penentuan jumlah informan dilakukan dengan cara *snowball sampling* (Groenewald, 2004), wawancara dengan informan dihentikan apabila tujuan penelitian telah diperoleh. Kedua, teknik observasi dilakukan secara non partisipan, untuk menggali data yang tidak dapat diungkap pada saat wawancara. Data sekunder juga digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan, diperoleh dari arsip kantor kecamatan dan kelurahan, catatan pemimpin lokal, penelitian terdahulu, surat kabar, majalah dan beberapa jurnal serta surat kabar lokal.

Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang hasilnya dibuatkan transkrip hasil wawancara, hasil observasi digunakan untuk triangulasi atas hasil wawancara. Data sekunder yang diperoleh dari laporan kelurahan menjadi sumber pendukung untuk memperkuat data primer. Analisis dilakukan dengan teknik kualitatif, mengikuti model yang dikembangkan oleh Huberman dan Miles, 1984 (dalam Denzin dan Lincoln, 1994), yang dikenal dengan interaksi. Model ini dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data yang sudah teranalisis, dan penarikan kesimpulan.

C. Tindakan Warga Merapi menjaga Daerah Resapan Air

Kebergantungan Sumber Air Gunung Merapi: Sumber mata air di Gunung Merapi memiliki tiga karakter. Bagian paling atas memiliki 82 titik umbul, bagian tengah memiliki 82 titik umbul, dan bagian bawah memiliki 32 umbul. Dengan tiga karakter sumber mata air tersebut

warga Merapi memiliki sumber cadangan air berlimpah, hingga mencapai 129.000.000 m³ setiap tahunnya (Indrayana, 2011 dikutip Napsiah, 2015). Sumber mata air Gunung Merapi, dimanfaatkan warga pascaerupsi untuk keperluan sehari-hari, seperti mencuci, mandi, dan minum. Sumber mata air Merapi juga digunakan warga untuk irigasi sawah dan kolam ikan. Sumber mata air tersebut berasal dari Kali Bebeng, dengan debit 1.238 liter per detik; Kali Kuning dan Kali Boyong, dengan debit sekitar 800-1.000 liter per detik. Ketersediaan air pada tiga sungai di lingkungan Merapi, terutama daerah bagian selatan gunung, tidak pernah kekurangan air sekalipun musim kemarau.

Daerah lereng selatan Merapi tidak pernah dilanda banjir karena terdapat sarana dan prasarana yang memadai untuk mengalirkan sumber mata air tersebut, disebabkan kondisi Gunung Merapi secara topografi dengan ketinggian antara 750-1.500 meter di atas permukaan laut derajat kemiringan berkisar antara 120°-300° menjadi daerah tangkapan air. Daerah tersebut merupakan daerah terluas di kawasan hutan Gunung Merapi yang menjadi daerah pelepasan air, kemudian menjadi sumber mata air dengan kedalaman antara 5-10 m, terdapat juga sumber mata air yang berpola radier (menjari) dengan aliran ke arah selatan dan barat.

Masyarakat Yogyakarta dan Jawa Tengah tidak akan kehabisan sumber air bersih, sekalipun pada saat musim kemarau yang panjang, sehingga Gunung Merapi dijuluki "jantung atau nyawa Yogyakarta". Warga yang bermukim di sekitarnya pascaerupsi berupaya menjaga dengan cara tidak berlebihan mengelola sumber air Gunung Merapi, sebab beragam potensi Merapi yang lain dapat dijadikan sumber penghidupan warga. Berbagai tindakan warga Merapi menjaga daerah tangkapan air pascaerupsi seperti, tidak menebang pohon, tidak mencari rumput di tempat-tempat yang dianggap terlarang oleh warga Merapi. Mereka juga tidak mengotori air sungai di lingkungan Merapi. Bentuk larangan tersebut telah lama disepakati oleh warga Merapi, bahkan telah menjadi kearifan lokal. Pelanggar akan mendapat sanksi sosial berupa pengucilan, sehingga pelanggar tidak tenang hidupnya. Sistem nilai yang dianut warga Merapi, yaitu menjaga kehormanisan dengan alam telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan, sehingga apabila ada pihak yang mengelola sumber daya Gunung Merapi secara berlebihan, warga pascaerupsi berupaya untuk menyelamatkan lingkungannya, sekalipun dengan menggunakan aksi-aksi sebagai bentuk penolakan.

Aksi Kolektif "Bela Lereng Merapi": Kerusakan lingkungan tangkapan air pascaerupsi adalah isu yang dibawa oleh aksi kolektif warga Merapi, karena ada aktivitas penambangan pasir yang menggunakan alat berat yang mencapai kedalaman 25 m di lingkungan tangkapan air. Akibat aktivitas penambangan pasir tersebut, air sumur warga pascaerupsi berkurang. Meskipun belum terjadi kelangkaan air bersih, tetapi warga mengantisipasi sejak dini terhadap kelangkaan air bersih, sebab sebelumnya warga belum pernah mengalami kekurangan air seperti yang dialami mereka saat ada penambangan pasir pascaerupsi di lingkungan tangkapan air. Warga berupaya mengantisipasi kerusakan lingkungan tangkapan air bersih pascaerupsi dengan menggunakan tindakan lokal, baik yang dilakukan secara mandiri maupun kolektif. Uraian berikut menggambarkan tindakan kolektif warga Merapi pada pascaerupsi yang dimanifestasikan dalam bentuk aksi-aksi menentang penambangan pasir yang menggunakan alat berat.

Sejak pagi hari jalan pertigaan Candi Desa Purwobinangun dipadati oleh warga yang jumlahnya kurang lebih 300 orang. Mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan, baik muda maupun tua, berasal dari tiga desa yang berada di sekitar Gunung Merapi, Desa Purwobinangun, Girikerta dan Wonokerto. Dengan menggunakan ikat kepala bertulisan "Bela Lereng Merapi" mereka menyampaikan sikap penolakan terhadap penambangan pasir yang menggunakan alat berat, melalui orasi yang dipimpin oleh seorang ketua. Aksi kolektif lokal tersebut tampaknya berhasil menghentikan aktivitas penambangan pasir dengan menggunakan alat berat. Satu demi

satu alat angkut pasir berupa truk pasir turun tanpa membawa pasir di dalam truk mereka, alat berat juga diturunkan dari lereng Merapi, aksi berlangsung sampai malam dini hari hari karena alat-alat berat tidak mudah diturunkan.

Aksi kolektif warga Merapi berlangsung sampai semua alat berat diturunkan (jumlahnya 19 buah), mereka menunggu di pertigaan Jalan Candi, walaupun berlangsung sampai larut malam, tetapi tidak terjadi aksi kekerasan antara warga dengan penambang pasir. Aksi kolektif warga Merapi tidak saja disampaikan melalui orasi, tetapi juga disampaikan melalui spanduk. Awalnya spanduk tersebut dipegang oleh anggota, tetapi kemudian di pasang di jalan-jalan sekitar jalan Candi. Tulisan-tulisan di spanduk tersebut berisi penolakan yang keras terhadap penambangan pasir yang menggunakan alat berat. Aksi kolektif warga Merapi juga dilakukan dengan cara memblokir Jalan Candi, yang merupakan jalan satu-satunya menghubungkan ke arena pertambangan pasir. Jalan di tutup dengan pohon kelapa yang mereka dapatkan di sekitar Jalan Candi.

Jalan yang semula telah berlubang karena dilalui truk pengangkut pasir, semakin diperdalam bahkan ditumpuki daun-daun serta pohonpohon, sehingga tidak bisa dilalui oleh truk-truk pengangkut pasir. Aksi berlangsung selama tiga hari, setiap dan sore hari, warga mengantarkan anak sekolah menggunakan sepeda motor melewati jalan yang diblokir oleh warga. Kondisi Jalan Candi kemudian tidak tampak kendaraan berlalu lalang, aktivitas warga tidak berjalan seperti biasanya, tidak ada mediasi antara warga dengan aparat. Warga benar-benar tidak mau diajak untuk musyawarah mufakat karena merasa aparat tidak merespons persoalan mereka. Warga merasa selalu dijanjikan tetapi tidak pernah ditindaklanjuti oleh pihak-pihak berwenang. Meskipun tidak ada mediasi, tetapi sekitar 100 m dari aksi kolektif warga Merapi tampak aparat keamanan melakukan penjagaan ketat.

Setelah dipastikan alat berat sudah turun dan alat pengangkut pasir tidak ada lagi, aksi kolektif dihentikan. Jalan dibuka kembali dan pohonpohon yang digunakan untuk memblokir jalan disingkirkan, tetapi warga yang bermukim di sekitar Jalan Candi tetap waspada. Mereka masih berjaga-jaga di lingkungan tempat tinggal dan di sekitar arena pertambangan untuk mengantisipasi muncul hal-hal yang tidak diinginkan setelah aksi kolektif lokal. Meskipun penambangan pasir telah dihentikan, tetapi warga masih merasa bahwa debit air sumur tetap berkurang, terlebih lagi saat musim kemarau, tetapi bagi warga yang kekurangan air sumur akan kembali normal apabila tidak ada penambangan pasir yang menggunakan alat-alat berat di lingkungan tangkapan air.

Melapor pada Aparat setempat: Tindakan warga Merapi membentuk aksi-aksi kolektif tersebut merupakan akumulasi dari tindakan warga yang telah berupaya melakukan tindakan musyawarah dan mufakat dengan aparat setempat. Mereka sudah berulang kali menyampaikan permohonan kepada aparat dan pemerintah setempat agar ada aturan penambangan pasir yang tidak berlebihan, tetapi pengaduan tersebut direspons saja tanpa ada tindakan lanjut. Tindakan menghubungi aparat setempat yang dilakukan oleh warga Merapi melalui perwakilan. Kepala desa dan jajarannya mendatangi aparat setempat untuk meminta pertimbangan agar ada regulasi yang tegas terkait dengan adanya penambangan pasir. Hal ini dilakukan mengingat bahwa warga Merapi mengkhawatirkan kondisi lingkungan mereka yang setiap hari menjadi arena penambangan pasir.

Apabila penambangan pasir pascaerupsi dilakukan dengan menggunakan alat tradisional warga tidak keberatan, tetapi melihat kondisi pasir yang ada di arena penambangan pasir tidak mungkin pasir dapat ditambang dengan menggunakan alat tradisional. Kondisi tidak terhenti di situ saja, penambang pasir membeli lahan warga untuk dijadikan arena penambangan pasir, sehingga membuat warga Merapi semakin bergejolak, mengingat kondisi air berkurang dan penambangan pasir dilakukan di tempat pengendapan air dari Gunung Merapi. Warga menyampaikan kembali ke aparat keamanan

dan pihak pemerintah untuk mencari penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi, tetapi tampaknya laporan tersebut tidak direspons oleh pemerintah dan penambangan tetap menggunakan alat-alat berat di daerah penambangan yang berada di sekitar pemukiman warga. Truk-truk yang mengangkut pasir beroperasi (sekitar 450 truk) setiap hari melintas di jalan-jalan dekat permukiman warga, mengakibatkan jalan-jalan rusak parah dan udara kotor karena berdebu.

Tindakan Warga Merapi menjaga Lingkungan: Kebergantungan warga terhadap sumber alam khususnya Gunung Merapi pascaerupsi sangat tinggi, karena menyediakan sumber air bersih penghidupan warga yang bermukim di sekitarnya. Apabila sumber alam tersebut dirusak oleh pihak-pihak lain dengan cara berlebihan, berbagai tindakan reaktif pascaerupsi dilakukan warga Merapi untuk mempertahankan kelestarian lingkungan. Warga mengutamakan kearifan lokal untuk mengelola potensi Merapi. Menurut Fisher (2006) kearifan lokal tersebut dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun kearifan lokal warga Merapi tidak dipraktikan dengan aktivitasaktivitas ritual, tetapi kearifan lokal yang mereka jalankan lebih mengedepankan perilaku untuk menjaga lingkungan, seperti tidak memanfaatkan potensi Merapi pascaerupsi secara berlebihan yang pada akhirnya akan merusak kelestarian lingkungan. Perilaku tersebut disosialisasikan, bahkan dijalankan secara turun temurun.

Apabila pengelolaan sumber daya Gunung Merapi sudah melampaui kebiasaan seharihari, warga mengedepankan nilai yang mereka anut, yaitu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, salah satu kearifan lokal warga Merapi yang digunakan untuk mencari solusi yang tepat, baik dari mereka selaku warga yang terdampak korban penambangan pasir pascaerupsi dan penambang pasir. Upaya itu dilakukan dengan cara melaporkan persoalan mereka kepada pihak-pihak yang berwenang. Dalam konteks ini, menurut Manzungu, et al (2013) adalah tindakan evaluatif, tindakan yang mengedepankan nilai diyakini oleh warga sebagai cara untuk menyelesaikan persoalan

lingkungan dibantu oleh pihak-pihak keamanan ataupun pihak-pihak lain yang berwenang.

Berbeda dengan Manzungu, et al (2013), Weber (1978) menyatakan, tindakan yang dilakukan oleh warga Merapi dengan cara menghubungi aparat keamanan dan pihak-pihak yang berwenang adalah tindakan nilai, tetapi menurut Weber tindakan nilai seringkali abstrak karena tidak secara tegas menunjukkan hasil yang maksimal. Apabila merujuk pada Weber, tindakan warga Merapi yang mengedepankan nilai musyawarah untuk mencapai mufakat tidak memperoleh hasil yang maksimal untuk menghentikan penambangan pasir yang merusak lingkungan mereka.

Tindakan aksi "Bela Lereng Merapi" pascaerupsi menjadi pilihan warga untuk menyelamatkan lingkungan. Menurut Jain (1984), aksi-aksi lokal tidak semata-mata dimaknai konflik, karena aksi lokal tersebut menjadi cara rasional yang dilakukan oleh warga. Merujuk pada Weber (1978), tindakan rasional adalah tindakan yang penuh arti karena dilakukan untuk mencapai tujuan, tindakan aksi yang dilakukan oleh warga Merapi tidak lain adalah mempertahankan sumber tangkapan air yang menjadi sumber penghidupan mereka pascaerupsi. Tindakan dengan mengunakan aksi lokal juga sudah lama dilakukan oleh warga India yang terkenal dengan "Gerakan Cipko". Gerakan ini dilakukan untuk menolak penebangan pohon, karena pohon sumber air bagi warga. Hal yang sama menurut Manzunggu, et.al (2013) aksi lokal yang terjadi di Afrika utara dan Zimbabwe adalah cara warga untuk dapat mengakses air. Tidak berbeda dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh warga India dan Zimbabwe, aksi kolektif lokal yang dilakukan oleh warga Merapi yang diberi nama aksi "Bela Lereng Merapi", bertujuan untuk menyelamatkan tangkapan air pascaerupsi.

Tindakan aksi kolektif warga Merapi dilakukan setelah beberapa tindakan yang mengedepankan nilai dilakukan, tetapi tidak menyelesaikan persoalan yang dihadapi, sehingga tindakan aksi kolektif lokal dilakukan sebagai cara untuk menghentikan penambangan pasir dengan menggunakan alat berat. Tindakan aksi warga Merapi menurut Weber (1978) adalah tindakan yang rasional, karena tindakan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan, walaupun menggunakan aksi-aksi pemblokiran jalan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial antarwarga dengan pemerintah setempat, tetapi tindakan tersebut menjadi cara warga untuk menghentikan penambang pasir pascaerupsi.

Mengacu pendapat Weber tentang tipologi rasionalitas tindakan sosial yang menyatakan bahwa rasionalitas nilai yang bersifat abstrak menjadi sarana untuk mencapai rasionalitas tujuan, tampaknya tidak demikan halnya dengan tindakan warga Merapi dalam menjaga lingkungan tangkapan air. Warga Merapi menganggap tindakan nilai bukan menjadi cara menjaga lingkungan, tetapi justru tindakan aksi yang dijadikan cara untuk mencapai tujuan, karena dengan melakukan aksi-aksi pemblokiran jalan penambangan pasir yang merusak lingkungan tangkapan air menggunakan alat-alat berat, dapat dihentikan

D. Penutup

Kesimpulan: Kebergantungan warga Merapi terhadap sumber daya alam gunung sangat tinggi, karena berbagai potensi gunung, seperti air merupakan sumber penghidupan warga yang bermukim di sekitarnya pascaerupsi. Warga Merapi melakukan berbagai tindakan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan pascaerupsi akibat pengelolaan sumber daya gunung secara berlebihan, yang potensial merusakan lingkungan tangkapan air, dengan mengunakan aksi-aksi untuk menolak pihak penambang pasir yang mengelola sumber daya alam pegunungan secara berlebihan. Tindakan kolektif dilakukan mengingat tindakan dengan cara mengedepankan nilai, ternyata tidak mampu menghentikan aktivitas pengelolaan sumber daya alam Gunung Merapi pascaerupsi secara berlebihan. Tindakan kolektif dengan cara menggunakan aksi-aksi sematamata menjadi upaya warga untuk menjaga lingkungan, bukan membangun konflik sosial

terhadap pihak lain khususnya penambang pasir yang menggunakan alat berat.

Daftar Pustaka

- Carey, N.S. (2005). *Understanding the Physical Behavior of Volcanoes* dalam Mart, Joan and Gerald G.J. Ernast (ed). *Volcanoes and the Environment*. Cambridge University Press.
- Fischer, M. (2006). Powerful Knowledge Applications in a Cultural Context dalam Allan Bicker, Paul Sillitoe and Johan Pottier (ed). Develompment and Lokal Knowledge New Approachhes to Issues in Natural Resources Management. Conservation and Agriculture, Routledge.
- Groenewald, T. (2004). *A Phenomenological Research Desaign Ilustrated. International* Journal Of Qualitative Methods, 3 (10).
- Hamid, R.A and Jahja, S.R. (2016). *Developing Environmental Educational Model Based on Lokal Wisdom*. Komunitas International Journal of Indonesian Society and Culture, 8 (1).
- Huberman, M.A. dan M.M. Miles. (1984). *Data Management and Analysis Methods*. dalam Denzin, K.N dan Y.S. Loncoln (ed). *Handbook Of Qualitative Research*". London: Sage Publication.
- Indrayana, H. 2010. *Mencermati sumber daya air* pascaerupsi Merapi 2010. Unpublication.
- Jain, S. (1984). Women and People's Ecologi Movement: A Case Study of Women's Role in the Chipco Movement in Uttar Pradesh. Economic & Political Weekly. 19 (4).
- Kerap, S. (2006). *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas.
- Khasanah dan Marfai, M.A. (2012). Kerawanan dan Kemampuan Adaptasi Masyarakat Pesisir terhadap Bahaya Banjir Genangan dan Tsunami. Integrasi Kajian Kebencanaan dan Sosial Budaya". Dalam Indiyanto, A & Kuswanjono, A (ed). Konstruksi Masyarakat Tangguh Bencana. Bandung: Mizan dan Yogyakarta: Sekolah pascasarjana UGM.
- Malik, A. (2012). *Perayaan Maulid Hijau di Lereng Gunung Lamongan*". Dalam Indiyanto,

- A dan Kuswanjono, A (ed). *KajianAgama, Budaya dan Agama*. Bandung: Mizan dan Yoyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Manzungu, E., L. et. al. (2013). *Emerging Forms of Social Action in Urban Domestic Water Supply in South Africa and Zimbabwe*. Journal of Sustainable Developing . 6 (3).
- Mcdonald, K. (2010). From Solidarity to Fluidarity: Social Movement Beyond 'Collective identity' the Case of Globalization Conflict. Journal Social Movement Studies. 2:109.
- Napsiah, (2015). *Rasionalitas Warga di Daerah Rawan Bencana Merapi* Yogyakarta. Disertasi: Unpad.
- Patton, M.Q. (2009). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Budi Puspo Priyadi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qodir, Z. (2012). Bencana Merapi dan Mitos di Masyarakat. Kasus Masyarakat Glagah Harjo dan Kinahrejo. Dalam Hasse, J, Ferry

- Muhamadsyah Siregar, Pradiastuti P (Editor). *Merapi dalam Kajian Multidisipliner*. Yogyakarta: Pascasarjana UGM.
- Suhartini. (2009). *Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*. Prosiding Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan, Fakultas MIPA. Yogyakarta: UNY.
- Triyogo, L. S. (2009). *Merapi dan Orang Jawa: Persepsi dan kepercayaan*. Jakarta: Grasindo.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline ofInterpretive Sociology*. Edited by Guenther Rot and Clans Wittich. Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press.
- BNBPD Sleman, 2010. Erupsi Gunung Merapi.
- Undang-undang No 23 Tahun 1979 tentang *Pengelolaan Alam dan Lingkungan*.